



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

Judicial System Monitoring Programme
JSMP Siaran Pers
Kamis, 19 Juli 2005

Parlemen Menyetujui Rancangan Undang-Undang Demonstrasi yang telah Direvisi

Kemarin, tanggal 18 Juli 2005, Parlemen Nasional menyetujui (pass by) Undang-undang Kebebasan berkumpul dan Berpendapat setelah menghapus ayat 3 dan 4 dari pasal 5 yang menurut Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada konstitusi (unconstitutional) pada bulan Mei lalu

Undang-undang tersebut sebelumnya disetujui oleh Parlemen Nasional pada tanggal 7 Desember 2004. Undang-undang tersebut dikirim kembali ke Parlemen untuk diperdebatkan kembali setelah Presiden mengirimkan beberapa pasal ke Pengadilan Tinggi untuk melakukan peninjauan hukum (constitutional review). Pasal-pasal yang menurut President perlu dilakukan peninjauan hukum adalah pasal 5 ayat 3 dan 4, pasal 6, pasal 7, dan pasal 15 ayat 1 dan 2 .

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal-pasal yang disebutkan di atas semuanya sah secara konstitusional (tidak bertentangan dengan konstitusi), kecuali pasal 5 ayat 3 dan 4 yang membatasi hak berkumpul dan berpendapat bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 dari konstitusi Timor Leste. Ayat-ayat ini melarang melakukan demonstrasi yang bertujuan untuk menanyakan tata hukum Negara, mempertanyakan keabsahan badan-badan dan lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratik dan berniat untuk menghina martabat dan kehormatan Kepala Negara dan pemegang badan kekuasaan Negara.

Undang-undang tersebut akhirnya dikembalikan ke Parlemen Nasional untuk dirumuskan kembali ayat 3 dan 4 dari Pasal 5 sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi. Parlemen dengan suara bulat memilih untuk menghapus ayat-ayat di atas. Sementara itu tidak perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal lain. Undang-undang tersebut akan dikirim ke Presiden untuk diberlakukan atau melakukan veto. JSMP menyambut baik baik keputusan Parlemen Nasional untuk menghapus ayat –ayat tersebut , akan tetapi ditekankan lagi bahwa pasal 6, 7 dan 15 masih membatasi hak berkumpul dan berdemonstrasi.

END